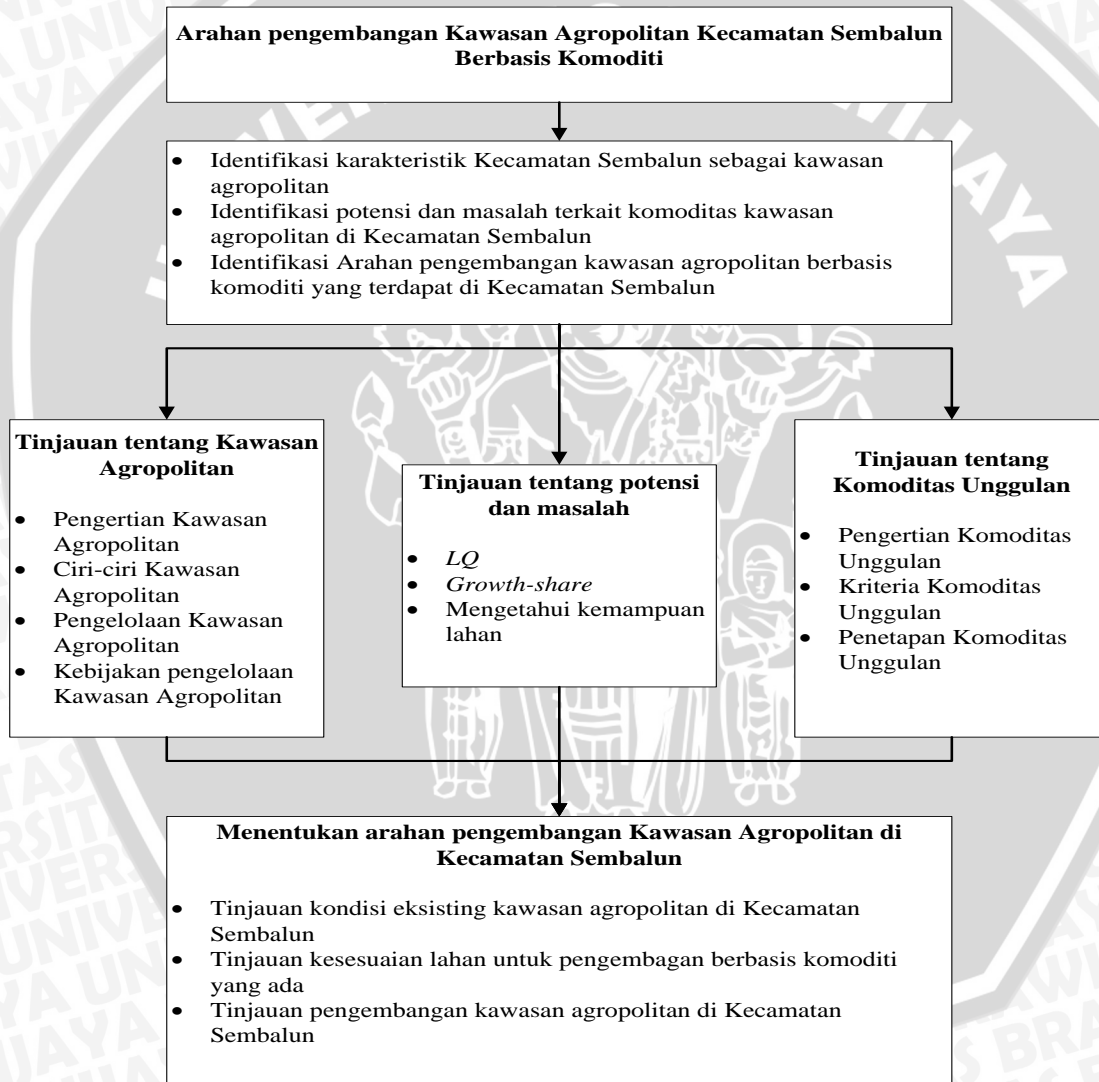


BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Studi arahan pengembangan Kecamatan Sembalun menggunakan konsep agropolitan berbasis komoditi meneliti tentang karakteristik wilayah studi yang meliputi karakteristik fisik dan binaan, menentukan komoditas unggulan di Kecamatan Sembalun, menentukan potensi masalah yang ada sehingga nantinya memunculkan arahan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Sembalun. Alur penelitian dijelaskan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.2 Pengembangan Wilayah

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat hal yang paling berpengaruh adalah pengembangan wilayah. Menurut Tarigan (2005) perencanaan pembangunan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah, selain itu dijelaskan juga bahwa perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya *less-spatial* (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat *spatial* dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang.

Pengembangan wilayah atau *regional planning* adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan daerah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan manusia dan alamnya (Nurzaman 1998:2). Pengembangan wilayah antara lain ditujukan untuk:

1. Meningkatkan keserasian dan keseimbangan antar pembangunan sektoral dengan regional,
2. Meningkatkan keserasian dan keseimbangan pembangunan antarwilayah,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan, dan
4. Meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan hinterlandnya, serta hubungan antara kota dan desa.

Dijelaskan dalam Tarigan (2005) bahwa pendekatan sektoral untuk tiap sektor atau komoditi diberikan sebuah analisis sehingga dapat memberi jawaban berkaitan tentang sektor atau komoditi apa yang dapat bersaing di pasar global, sektor atau komoditi apa yang basis dan non-basis, sektor atau komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, sektor atau komoditi apa yang memiliki *forward linkage* dan *backward linkage* yang tinggi, sektor atau komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut dan sektor atau komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja per satu satuan modal dan per satu hektar lahan.

2.3 Konsep Kawasan Agropolitan

2.3.1 Agropolitan

Menurut Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan (Agropolitan) Nasional dan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, pengertian Agropolitan adalah upaya

pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Menurut Departemen Pertanian (2002), agropolitan terdiri dari kata agro dan politan (polis). Agro berarti pertanian dan politan berarti kota. Dengan demikian agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedang yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Menurut pemikiran Friedmann, konsep agropolitan terdiri atas distrik-distrik agropolitan dan setiap distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa/km². Distrik dalam agropolitan akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk antara 10.000 – 25.000 jiwa. Batas distrik dinyatakan dalam radius pelayanan sejauh 5 – 10 km atau kurang lebih setara dengan 1 jam perjalanan dengan sepeda. Dimensi luasan geografis wilayah agropolitan ini akan menghasilkan jumlah penduduk total 50.000 – 150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Disini Friedmann cenderung tidak membedakan secara spesifik bentuk pertaniannya, apakah dikelola secara corporate ataukah konvensional.

Pada konsep ini strategi pengembangan harus menciptakan perekonomian perdesaan yang mandiri dengan hubungan minimal pada ekonomi metropolitan. Strategi ini mengharuskan setiap daerah memiliki otonomi dan sumber daya yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri.

2.3.2 Kawasan Agropolitan

A. Kawasan Agropolitan

Menurut UU No. 26 tahun 2007 kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam

proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. Kawasan agropolitan merupakan embryo kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.

B. Persyaratan Kawasan Agropolitan

Berdasarkan pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) tahun 2003 suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
- 2) Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
- 3) Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.
- 4) Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

C. Ciri-ciri Kawasan Agropolitan

Suatu kawasan agropolitan (*Friedman and Douglass, 1974*) yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sebagian besar masyarakat dikawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis).
2. Kegiatan di kawasan tersebut sebagian besar didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian,

perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.

3. Hubungan antara kota dan daerah-daerah *Hinterland* di kawasan agropolitan bersifat interdependensi atau timbal balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
4. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan kota.

D. Tipologi Kawasan

Kawasan agropolitan memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan agribisnisnya masing-masing. Adapun tipologi kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tipologi Lahan Kawasan Berdasarkan Kesesuaian Lahan dan Persyaratan Agroklimat

No.	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agroklimat
1.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng <8%), kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, memiliki dan atau tidak memiliki prasarana inigasi untuk pengembangan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembang sesuai dengan agropedoklimat setempat
2.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, dan tersedia sumber air yang cukup.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
3.	Perkebunan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
4.	Peternakan	Dataran rendah dan dataran tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan sistem sanitasi yang cukup.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat

No.	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agroklimat
		Tidakberadadi permukiman dan memperhatikan aspek lingkungan.	

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2009

E. **Infrastruktur**

Sarana dan prasarana penunjang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), yang meliputi:

- 1) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) untuk menunjang kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan sentra produksi pangan dan sebaliknya, seperti : bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dan lain-lain. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Jalan penghubung antar desa-kota
 - b. Gudang penyimpanan saprotan (sarana produksi pertanian)
 - c. Tempat bongkar muat saprotan
- 2) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on-farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha budi-daya pertanian: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Jalan usaha tani (*farm road*) dari desa pusat ke desa hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi pemasok hasil pertanian.
 - b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian.
 - c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budi daya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun di laut.
 - d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi hinterland
- 3) Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.

- b. Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*).
- c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk food service, seperti: pembuatan kripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar supermarket, aero catering, dan lain-lain.
- d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti: pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis.
- e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA).
- f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis
- g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkaran desa yang menghubungkan beberapa desa *hinterland*.
- i. Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan.

F. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Konsep pengembangan kawasan agropolitan secara garis besar mempunyai 2 konsep yaitu :

1. Konsep Pendekatan Wilayah

Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sementara itu, kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional

dan sistem permukiman pada tingkat Propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW kabupaten).

Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya. Kawasan pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya perkotaan. Disini nantinya diharapkan akan terbentang sebuah panorama kota yang asri, sejuk dan damai. Namun dengan fasilitas yang tidak kalah dengan sebuah kota modern, dimana berbagai sarana seperti jaringan jalan, lembaga keuangan, pasar, perkantoran, lembaga penyuluhan dan alih teknologi, lembaga pendidikan serta penelitian yang berdiri anggun di sela-sela hamparan lahan pertanian yang menghijau. Disini nantinya juga tersedia sarana air bersih, kantor kelembagaan milik petani dan lembaga kesehatan.

Pengembangan kawasan agropolitan bukanlah konsep baru tetapi merupakan kelanjutan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan pada Kawasan Andalan baik pada daerah-daerah Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), maupun pada Kawasan Tertinggal. Disamping itu, pengembangan kawasan agropolitan juga perlu mengoptimalkan hasil-hasil program sebelumnya seperti Program Bimas, Program kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Program kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pedesaan (PPSD) dan Program Pengemngan Kecamatan (PPK). Dengan demikian, program kawasan yang akan dikembangkan adalah untuk mensinergikan berbagai program baik yang berasal dari pusat, propinsi dan kabupaten/kota pada kawasan andalan yang ditetapkan daerah.

Dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun master plan pengembangan kawasan agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan-muatan yang terkandung didalamnya diantaranya :

- a. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan tranportasi pertanian (*agricultural trade/transport center*), penyedia jasa pendukung pertanian (*agriculture support services*), pasar konsumen produk non pertanian (*non*

- agriculture consumers market*), pusat industri pertanian (*agro based industry*), Penyedia pekerjaan non pertanian (*non agricultural employment*) dan pusat agropolitan serta hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi dan kabupaten.
- b. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian (*agricultural production*), intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*), pusat pendapatan pedesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand fo agricultural goods and services*) dan produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversivication*).
 - c. Penetapan sektor unggulan, yaitu merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, kegiatan agibisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar dan mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
 - d. Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi)
 - e. Dukungan sistem kelembagaan, yaitu dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat dan pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan. Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan pedesaan berinteraksi satu sama lainnya secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan sehingga pembanguinan pedesaan dapat dipacu dan migrasi desa kota yang terjadi dapat dikendalikan.

2. Konsep Pendekatan Pemberdayaan SDM.

Sementara itu, sejalan dengan pengembangan kawasan agropolitan melalui konsep pendekatan wilayah maka konsep pendekatan pemberdayaan sumberdaya manusia/masyarakat harus seiring dan sejalan. Pemberdayaan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka pengembangan kawasan agropolitan dengan pendekatan

wilayah akan kurang bisa mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumberdaya manusia dapat terlaksana dan sesuai dengan harapan, jika setiap komponen dan fungsi organisasi baik di pusat maupun di daerah memandang upaya pengembangan sumberdaya manusia bukan sebagai unsur penunjang, melainkan merupakan bagian integral dari masing-masing fungsi organisasi (*integrative linkages*).

Agropolitan merupakan salah satu kerangka perencanaan wilayah yang secara eksplisit menyebutkan perlunya keterpaduan pengembangan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan.

Konsep agropolitan mengindikasikan bahwa pengembangan perdesaan dapat dilakukan dengan baik melalui keterkaitan perdesaan dengan perkotaan pada tingkat lokal. Terdapat tiga isu strategis dalam pengembangan agropolitan, yaitu : (a) aksesibilitas terhadap lahan dan irigasi; (b) devolusi otoritas administratif dan politis ke tingkat lokal; serta (c) perubahan kebijakan pembangunan nasional yang mendukung terciptanya diversifikasi produk pertanian.

Friedman (1992), menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan agropolitan adalah bagaimana kita mengintegrasikan *lokal capacity building* dan partisipasi masyarakat kedalam suatu program untuk mempercepat *mutually benefits* bagi kawasan perdesaan dan perkotaan dalam kerangka pembangunan nasional. Secara umum dalam pengembangan wilayah, konsep pengembangan kawasan agropolitan merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang lebih mendasarkan kepada keterkaitan/jaringan di daerah desa (*Regional Network*). Jika dibandingkan dengan teori pengembangan pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) terdapat sejumlah perbedaan baik dilihat dari sektor dasar, sistem kekotaan, hubungan desa-kota, model perencanaan, dan wilayah kebijakannya yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perbandingan Konsep Pengembangan Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*) dengan *Regional Network*

Komponen	Growth Pole	Regional Cluster Network
Sektor Dasar	Meliputi sektor manufaktur, seringkali terfokus pada industri penggerak berskala besar dengan unit produksi <i>Footloose</i> berada diluar wilayah	Semua sektor, tergantung kondisi dan potensi lokal dan regional, yang didukung oleh perusahaan lokal berskala kecil – menengah

Komponen	Growth Pole	Regional Cluster Network
Sistem Kota	Secara hierarkis, terpusat pada satu pusat dominan, yang seringkali diidentifikasi dengan populasi dan terkait dengan teori tempat sentral (<i>Central Place Theory, W. Christaller</i>)	Secara horizontal, disusun meliputi sejumlah pusat dengan daerah <i>Hinterland</i> yang masing-masing memiliki spesialisasi dan keunggulan komparatif
Hubungan Desa-Kota	Gambaran proses difusi dalam tingkat hirarki kota dan dari kota ke wilayah desa sekitarnya. Desa adalah wilayah pasif sebagai efek <i>Trickle-Down</i> pertumbuhan kota	Gambaran dari aktivitas desa-kota yang kompleks, dengan faktor pendorong dari keduanya baik desa maupun kota, serta intensitas transportasi dalam wilayah pertumbuhan
Gaya Perencanaan	Seringkali bersifat <i>Top-Down</i> , melalui agen perencanaan sektoral. Daerah memiliki batasan maya, ditunjukkan dengan interaksi ekonomi	Penerapan kebijakan desentralisasi, dengan integrasi dan koordinasi multisektoral dan aktivitas desa-kota pada tingkat lokal
Wilayah Kebijakan	Insentif desentralisasi, kawasan industri, transportasi jalan nasional	Diversifikasi pertanian, agroindustri, industri pengolah sumber daya, pelayanan kota, transportasi lokal daerah

Sumber : Mike Douglas, (1998).

2.4 Konsep Kawasan Hortikultura

2.4.1 Hortikultura

Menurut Pedoman Teknis Perluasan Kawasan Hortikultura Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, kawasan sentra produksi hortikultura adalah suatu kawasan sebagai pusat pengembangan agribisnis komoditas hortikultura yang berkelanjutan dengan luasan berskala ekonomis. Kawasan ini dapat berlokasi pada satu atau lebih kabupaten yang berdekatan/berdampingan.

Perluasan Areal Hortikultura adalah usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan terlantar guna meningkatkan produksi hortikultura. Pengembangan komoditas hortikultura yang ada harus sesuai dengan agropedoklimat sebagai syarat tumbuhnya komoditas tersebut. Agropedoklimat adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.

2.4.2 Standar Teknis

Standar teknis perluasan areal pada kawasan hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Komoditas yang dikembangkan adalah buah-buahan Unggulan Nasional dan Daerah yang mempunyai pangsa pasar yang baik.
- b. Bibit tanaman hortikultura harus bersertifikat.
- c. Ketentuan teknis persyaratan tumbuh masing-masing komoditas yang dibudidayakan
- d. Untuk lahan kering, kemiringan/topografi lahan masih pada batas yang layak untuk pengembangan komoditas hortikultura (maksimal 30%)
- e. Untuk lahan rawa pasang surut, lokasi yang disarankan pada tipe C atau D.
- f. Pembukaan lahan hortikultura diarahkan pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) yang sudah ada dan berpotensi untuk dikembangkan. Luas dalam satu hamparan diupayakan minimal 10 ha.

2.4.3 Kriteria Lokasi

Berdasarkan pedoman teknis perluasan areal kawasan hortikultura kriteria lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan hortikultura adalah:

- Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Merupakan daerah pengembangan kawasan sentra produksi hortikultura Unggulan Nasional atau Daerah.
- Telah mendapatkan persetujuan dari Bupati/ Walikota/ Kepala Dinas lingkup pertanian melalui SK Penetapan Lokasi.
- Bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Mempunyai aksesibilitas yang baik, relatif dekat dari pemukiman sehingga mudah dijangkau.
- Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis.
- Diutamakan lokasi yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas hortikultura.
- Faktor iklim (curah hujan, angin, kelembaban dan suhu) yang sesuai serta sumber daya air (sungai, danau, dam, air tanah dangkal dan air tanah dalam) tersedia untuk pengembangan hortikultura

- Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

2.5 Konsep Penataan Ruang Kegiatan Pertanian

2.5.1 Sarana dan Prasarana Pertanian

Departemen Kimpraswil (2002:10) merumuskan bahwa infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan agropolitan, meliputi:

1. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) untuk menunjang kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan sentra produksi pangan dan sebaliknya, seperti: bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dll. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Jalan penghubung antar desa-kota
 - b. Gudang penyimpanan Saprotan (sarana produksi pertanian)
 - c. Tempat bongkar muat Saprotan
2. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on-farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha budidaya pertanian: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Jalan usaha tani (*farm road*) dari desa pusat ke desa hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi pemasok hasil pertanian.
 - b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian.
 - c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budi daya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun di laut.
 - d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi *hinterland*
3. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.

- b. Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk di dalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*).
- c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk *food service*, seperti: pembuatan kripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar *supermarket*, *aero catering*, dan lain-lain.
- d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti: pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis.
- e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA).
- f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis
- g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkar desa yang menghubungkan beberapa desa *hinterland*.
- i. Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan.

2.5.2 Pembagian Ruang Pertanian

Menurut Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan (Agropolitan) Nasional dan Daerah No 15 tahun 2001, sistem kawasan agropolitan terdiri atas:

1. Kawasan lahan pertanian (*hinterland*)

Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan *hinterland* berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.

2. Kawasan pemukiman

Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan)

3. Kawasan pengolahan dan industri

Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Di kawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.

4. Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum

Yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.

5. Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya; kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

Pada konsep ini, pedesaan yang tadinya tertutup diusahakan supaya lebih terbuka, dan dapat terbentuk kota di wilayah pertanian (*agropolis*), sehingga penduduk pedesaan dapat meningkatkan pendapatannya serta mendapatkan prasarana sosial-ekonomi dalam jangkauannya, dan dengan demikian perpindahan ke kota dapat dikendalikan.

2.6 Komoditas Unggulan

2.6.1 Pengertian Komoditas Unggulan

Pengembangan perekonomian dipengaruhi oleh komoditas unggulan yang terdapat pada wilayah tersebut. Permasalahan yang ada timbul karena adanya persepsi tentang kriteria dan instrumen terhadap komoditas unggulan, yang berakibat pengembangan komoditas tersebut menjadi salah sasaran dan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan komoditas unggulan yang dimaksud. Komoditas unggulan akan lebih mudah dikembangkan, jika pengembangannya sesuai dengan kebutuhan pasar, karena masing-masing komoditas unggulan sebenarnya memiliki konsumen sendiri-sendiri.

Tarigan (2005) menyatakan bahwa keunggulan komparatif bagi suatu komoditas adalah komoditas tersebut relatif lebih unggul terhadap komoditas lainnya di wilayah yang sama, atau terhadap komoditas yang sama untuk wilayah yang berbeda. Komoditas yang memiliki nilai keunggulan lebih menguntungkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

2.6.2 Kriteria Komoditas Unggulan Nasional

Pada lingkup nasional kriteria komoditas unggulan diarahkan untuk ketahanan pangan dan merubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Komoditas unggulan nasional diharapkan memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

1. Mempunyai tingkat kesesuaian agroekologi yang tinggi.
2. Mempunyai pasar yang jelas.
3. Mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menciptakan nilai tambah.
4. Mempunyai kemampuan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
5. Mempunyai dukungan kebijakan pemerintah dalam bidang-bidang teknologi, prasarana, sarana, kelembagaan, permodalan dan infrastruktur lain dalam arti luas.
6. Merupakan komoditas yang telah diusahakan oleh masyarakat setempat.
7. Mempunyai kelayakan untuk diusahakan baik secara finansial maupun ekonomi.

2.6.3 Kriteria Penetapan Komoditas Unggulan Kabupaten

Pada lingkup Kabupaten/Kota kriteria penetapan komoditas unggulan mengacu kriteria komoditas unggulan nasional. Pada tingkat kabupaten komoditas basis dibedakan menjadi komoditas unggulan, andalan dan potensial. Komoditas potensial adalah komoditi tanaman/ternak/ikan yang sesuai agroekologi, dimana omzet sekarang relatif rendah namun memiliki peluang pasar. Komoditi andalan adalah komoditi tanaman/ternak/ikan yang sesuai agroekologi, dimana omzet sekarang relatif tinggi dengan peluang pasar baik, tetapi relatif kurang baik untuk “*positioning*” atau “*trademark*”. Komoditas unggulan adalah komoditi tanaman/ternak/ikan yang sesuai agroekologi, dimana omzet relatif tinggi, peluang pasar baik dan dapat digunakan sebagai alat “*positioning*” atau “*trademark*” dalam pemasaran. Komoditas unggulan diarahkan pada komoditi yang dapat ditingkatkan skala ekonominya hingga bermakna serta layak untuk ditingkatkan nilai tambahnya dalam agroindustri. Komoditas unggulan kabupaten diharapkan memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

1. Mengacu kriteria komoditas unggulan nasional.
2. Memiliki arti ekonomi yang tinggi di Kabupaten.
3. Mencukupi untuk kebutuhan sendiri dan mampu mensupply daerah lain atau ekspor;
4. Memiliki pasar yang prospek.
5. Merupakan komoditas unik berdaya saing tinggi.
6. Memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai tambahnya dalam agroindustri;.
8. Merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi.
9. Dapat dibudidayakan secara meluas di Kabupaten.

2.7 Analisis Potensi Ekonomi

Analisis potensi pertanian ini dilakukan untuk mengetahui sektor basis dan komoditas unggulan per desa di wilayah studi, sehingga bisa diketahui masing-masing karakteristik komoditas di masing-masing kecamatan. Alat analisis yang digunakan antara lain:

- **Analisis LQ**

LQ menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kondisi kekayaan yang ada di wilayah tersebut. LQ berguna untuk melihat spesialisasi kegiatan produksi suatu wilayah. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (Warpani, 1984:68). Dimana pada studi ini, daerah yang diselidiki adalah desa dan daerah yang lebih luas adalah kecamatan, sehingga dapat diketahui spesialisasi kegiatan produksi pada masing-masing desa dalam kecamatan tersebut.

Rumus:

$$LQ = \frac{S_i/N_1}{S/N} = \frac{S_i/S}{N_1/N}$$

Keterangan:

S_i	=	Jumlah produksi komoditas per desa.
S	=	Jumlah seluruh produksi buah/sayur/tanaman hias per desa.
N_1	=	Jumlah produksi komoditas di kecamatan.
N	=	Jumlah seluruh produksi buah/sayur/tanaman hias kecamatan.

Jika rasio lebih besar dari 1 ($LQ > 1$) menunjukkan kegiatan ekspor atau basis dan jika $LQ = 1$ menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan bila $LQ < 1$ menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan cenderung untuk import. Dari hasil tersebut, bila $LQ > 1$ diberikan tanda positif (+) dan bila $LQ = 1$ diberikan tanda positif (+) dan bila $LQ < 1$ maka diberikan tanda negatif (-). Kondisi diatas diasumsikan ($LQ = 1$) bahwa wilayah tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun mendatang dapat menunjukkan kegiatan ekspor atau hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

- **Analisis Growth – Share**

Growth untuk melihat tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun.

Rumus:
$$\text{Growth} = \frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

T_n = Jumlah produksi tahun ke-n

T_{n-1} = Jumlah produksi tahun awal

Dari hasil tersebut (growth 1 dan growth 2) dirata-rata. Hasil dari rata-rata diatas kemudian dijumlah kebawah sesuai dengan jumlah data dan hasilnya dijadikan standart bagi rata-rata produksi lain. Tanda positif (+) dinyatakan bahwa produksi tersebut berpotensi dan tanda negatf dianggap bahwa produksi tersebut kurang berpotensi.

Share membantu mengkarakteristikan struktur ekonomi berbagai wilayah.

Rumus:
$$\frac{NP_1}{NP_2} \times 100\%$$

Keterangan:

NP_1 = Nilai produksi komoditi a di satu desa

NP_2 = Nilai produksi komoditis a di seluruh wilayah studi

Dari hasil tersebut, bila share > 1 diberi nilai 3 dan bila share = 1 maka diberi nilai 2 dan bila share < 1 diberi nilai 1. Untuk menyatakan kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah dengan melihat ketentuan berikut: bila share yang diberi nilai 2 dan diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila Share diberi nilai 1 maka diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah). Nilai 2 dinyatakan memiliki kontribusi yang besar dengan asumsi bahwa perkembangan berikutnya akan mengalami peningkatan atau dalam kurun waktu 3 tahun kontribusi yang diberikan tetap atau dalam artian tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Dari hasil growth share dapat diagramkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2
Diagram *Growth & Share*

Dari hasil diagram diatas menunjukkan bahwa: jika suatu sektor/komoditas memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+) maka disebut sektor unggulan dan sektor ini dijadikan base sektor suatu wilayah. Jika suatu sektor/komoditas memiliki *growth* (-) dan *share* (+) maka disebut dengan sektor/komoditas potensial, dimana sektor/komoditas tersebut nantinya mampu dijadikan base sektor dalam waktu yang panjang. Jika sektor/komoditas memiliki *growth* (+) dan *share* (-) maka disebut dengan sektor/komoditas dominan yang nantinya mampu menjadi base sektor dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus. Dan jika sektor/komoditas tersebut memiliki *growth* (-) dan *share* (-) maka sektor/komoditas ini disebut dengan sektor/komoditas statis dimana nantinya dapat dijadikan sebagai sektor/komoditas dominan dengan perlakuan khusus dan upaya diversifikasi komoditas dan sebagainya.

2.8 Kelembagaan

Dalam pengembangan suatu kawasan agropolitan tidak lepas dari peran lembaga yang terbentuk di daerah tersebut. Pada pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) menjelaskan lingkup kelembagaan adalah suatu ketentuan berupa sistem pengelolaan yang menjembatani berbagai kepentingan antara instansi terkait atau disebut protokol. Protokol diarahkan kepada pengaturan hubungan antara

pemangku kepentingan dan antar tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pihak-pihak yang terkait dengan kelembagaan ini adalah Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan Dan Industri, Departemen Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Bapedal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD), Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia usaha, Masyarakat umum.

2.9 Kemampuan Lahan

2.9.1 Analisis Kemampuan Lahan

A. Pengertian Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha pertanian yang paling intensif yang termasuk juga tindakan pengelolaannya tanpa menyebabkan tanahnya menjadi rusak dalam jangka waktu yang terbatas. Lahan yang mempunyai kemampuan yang baik memiliki sifat fisik dan kimia yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga akan mampu mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman secara optimal dan berkesinambungan.

B. Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan. Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat.

C. Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan

Kategori subkelas dibagi ke dalam kategori unit pengelolaan yang didasarkan pada intensitas faktor penghambat dalam kategori subkelas. Dengan demikian, dalam kategori unit pengelolaan telah diindikasikan kesamaan potensi dan hambatan/risiko sehingga dapat dipakai untuk menentukan tipe pengelolaan atau teknik konservasi yang dibutuhkan. Kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan memberikan keterangan yang lebih spesifik dan detil dari subkelas. Tingkat pengelolaan lahan diberi simbol dengan menambahkan angka di belakang simbol subkelas. Angka ini menunjukkan besarnya tingkat faktor penghambat yang

ditunjukkan dalam subkelas, misalnya IIw1, IIIe3, IVs3, dan sebagainya. Penentuan kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan penting, terutama untuk melakukan evaluasi kecocokan penggunaan lahan saat ini. Evaluasi kecocokan penggunaan lahan diperlukan sebagai masukan bagi revisi rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada.

Klasifikasi pada kategori unit pengelolaan memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif tanah, tingkat erosi yang telah terjadi, liat masam (*cat clay*), batuan di atas permukaan tanah, ancaman banjir atau genangan air yang tetap. Berdasarkan Permen LH No 17 Tahun 2009 faktor-faktor tersebut digolongkan berdasarkan besarnya intensitas faktor penghambat atau ancaman, sebagai berikut:

1. Tekstur tanah

Tekstur tanah dikelompokkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

t1 = halus: liat, liat berdebu.

t2 = agak halus: liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir.

t3 = sedang: debu, lempung berdebu, lempung.

t4 = agak kasar: lempung berpasir.

t5 = kasar: pasir berlempung, pasir.

2. Permeabilitas

Permeabilitas dikelompokkan sebagai berikut:

p1 = lambat: < 0.5 cm/jam.

p2 = agak lambat: $0.5 - 2.0$ cm/jam.

p3 = sedang: $2.0 - 6.25$ cm/jam.

3. Kedalaman sampai kerikil, padas, plinthite (k)

Kedalaman efektif dikelompokkan sebagai berikut:

k0 = dalam: > 90 cm.

k1 = sedang: $90-50$ cm.

k2 = dangkal: $50-25$ cm.

k3 = sangat dangkal: < 25 cm.

4. Lereng permukaan (l)

Lereng permukaan dikelompokkan sebagai berikut:

- 10 = (A) = 0-3% : datar.
- 11 = (B) = 3-8% : landai/berombak.
- 12 = (C) = 8-15% : agak miring/bergelombang.
- 13 = (D) = 15-30% : miring berbukit.
- 14 = (E) = 30-45% : agak curam.
- 15 = (F) = 45-65% : curam.
- 16 = (G) = > 65% : sangat curam.

5. Drainase tanah (d)

Drainase tanah diklasifikasikan sebagai berikut:

- d0 = baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. profil tanah dari atas sampai lapisan bawah berwarna terang yang seragam dan tidak terdapat bercak-bercak.
- d1 = agak baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu pada lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah.
- d2 = agak buruk: lapisan atas tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, kelabu, atau coklat. Terdapat bercak-bercak pada saluran bagian lapisan bawah.
- d3 = buruk: bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan) terdapat warna atau bercak-bercak berwarna kelabu, coklat dan kekuningan.
- d4 = sangat buruk: seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak-bercak kelabu, coklat dan kekuningan.

6. Erosi (e)

Kerusakan oleh erosi dikelompokkan sebagai berikut:

- e0 = tidak ada erosi.
- e1 = ringan: < 25% lapisan atas hilang.
- e2 = sedang: 25-75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang.
- e3 = berat: > 75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang.
- e4 = sangat berat: sampai lebih dari 25% lapisan bawah hilang.

7. Faktor-faktor khusus

Faktor-faktor penghambat lain yang mungkin terjadi berupa batu-batuan dan bahaya banjir:

- a. Batuan

Bahan kasar dapat berada dalam lapisan tanah atau di permukaan tanah. Bahan kasar yang terdapat dalam lapisan 20 cm atau di bagian atas tanah yang berukuran lebih besar dari 2 mm dibedakan sebagai berikut:

1). Kerikil

Kerikil merupakan bahan kasar yang berdiameter lebih besar dari 2 mm sampai 7.5 mm jika berbentuk bulat atau sampai 15 cm sumbu panjang jika berbentuk gepeng. Kerikil di dalam lapisan 20 cm dikelompokkan sebagai berikut:

b0 = tidak ada atau sedikit: 0-15% volume tanah.

b1 = sedang: 15-50% volume tanah.

b2 = banyak: 50-90% volume tanah.

b3 = sangat banyak: > 90 % volume tanah.

2). Batuan kecil

Batuan kecil merupakan bahan kasar atau batuan berdiameter 7.5 cm sampai 25 cm jika berbentuk bulat, atau sumbu panjangnya berukuran 15 cm sampai 40 cm jika berbentuk gepeng. Banyaknya batuan kecil dikelompokkan sebagai berikut:

b0 = tidak ada atau sedikit: 0-15% volume tanah.

b1 = sedang: 15-50% volume tanah.

b2 = banyak: 50-90% volume tanah.

b3 = sangat banyak: > 90% volume tanah.

3). Batuan lepas (stone)

Batuan lepas merupakan batuan yang bebas dan terletak di atas permukaan tanah, berdiameter lebih besar dari 25 cm (berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk gepeng). Penyebaran batuan lepas di atas permukaan tanah dikelompokkan sebagai berikut:

b0 = tidak ada: kurang dari 0.01% luas areal.

b1 = sedikit : 0.01%-3% permukaan tanah tertutup.

b2 = sedang : 3%-15% permukaan tanah tertutup.

b3 = banyak : 15%-90% permukaan tanah tertutup.

b4 = sangat banyak: lebih dari 90% permukaan tanah tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digunakan untuk produksi pertanian.

4). Batu terungkap (rock)

Batuan terungkap merupakan batuan yang tersingkap di atas permukaan tanah, yang merupakan bagian dari satuan besar yang terbenam di dalam tanah (batuan tertutup). Penyebaran batuan tertutup dikelompokkan sebagai berikut :

b0 = tidak ada: kurang dari 2% permukaan tanah tertutup.

b1 = sedikit : 2% - 10% permukaan tanah tertutup.

b2 = sedang : 10% - 50% permukaan tanah tertutup.

b3 = banyak : 50% - 90% permukaan tanah tertutup.

b4 = sangat banyak : lebih dari 90% permukaan tanah tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digarap.

b. Ancaman banjir/genangan

Ancaman banjir atau penggenangan dikelompokkan sebagai berikut:

o0 = tidak pernah: dalam periode satu tahun tanah tidak pernah tertutup banjir untuk waktu lebih dari 24 jam.

o1 = kadang-kadang: banjir yang menutupi tanah lebih dari 24 jam terjadinya tidak teratur dalam periode kurang dari satu bulan.

o2 = selama waktu satu bulan dalam setahun tanah secara teratur tertutup banjir untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.

o3 = selama waktu 2-5 bulan dalam setahun, secara teratur selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam.

o4 = selama waktu enam bulan atau lebih tanah selalu dilanda banjir secara teratur yang lamanya lebih dari 24 jam.

Berikut ini merupakan tabel kelas kemampuan lahan.

Tabel 2.3
Kelas Kemampuan Lahan

Faktor Penghambat/Pembatas	Kelas Kemampuan Lahan							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Tekstur tanah (t)								
a. Lapisan atas (40 cm)	t ₂ /t ₃	t ₁ /t ₄	t ₁ /t ₄	(*)	(*)	(*)	(*)	t ₅
b. Lapisan bawah	t ₂ /t ₃	t ₁ /t ₄	t ₁ /t ₄	(*)	(*)	(*)	(*)	t ₅
2. Lereng permukaan (%)	L ₀	l ₁	l ₂	l ₃	(*)	l ₄	l ₅	l ₆
3. Drainase	d ₀ /d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	(**)	(*)	(*)	(*)
4. Kedalaman efektif	k ₀	k ₀	k ₁	k ₂	(*)	k ₃	(*)	(*)
5. Keadaan erosi	e ₀	e ₁	e ₁	e ₂	(*)	e ₃	e ₄	(*)
6. Kerikil/batuan	b ₀	b ₀	b ₀	b ₁	b ₂	(*)	(*)	b ₃
7. Banjir	o ₀	o ₁	o ₂	o ₃	o ₄	(*)	(*)	(*)

Sumber: Permen LH No 17 Tahun 2009, tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah

D. Cara Penentuan Kemampuan Lahan

Penentuan kemampuan lahan terutama dilakukan untuk perencanaan ruang atau alokasi pemanfaatan ruang. Berdasarkan Permen LH No 17 Tahun 2009 diberikan langkah penentuan kemampuan lahan:

a. Penyiapan Peta

- a. Peta lereng
- b. Peta tanah
- c. Peta erosi
- d. Peta drainase/genangan

Siapkan peta dengan skala yang sama. Peta yang digunakan dapat berskala 1:250.000, 1:100.000, atau 1:50.000. Untuk keperluan analisa dan uji silang dari data kelas dan subkelas, diperlukan juga data/laporan yang memuat sifatsifat biofisik wilayah, antara lain: tanah, topografi, iklim, hujan, dan genangan/drainase.

b. Overlay Peta

Lakukan tumpang tindih (*overlay*) peta lereng, peta tanah, peta erosi dan peta drainase/genangan untuk mendapatkan kemampuan lahan sebagaimana tersebut pada gambar. Tumpang tindih dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) maupun secara manual.

c. Identifikasi Kelas Lahan

Dari *overlay* peta, didapat kombinasi keempat parameter di atas, sehingga dapat dilakukan identifikasi kelas lahan. Besarnya hambatan yang ada untuk masing-masing parameter menentukan masuk ke dalam kelas dan subkelas mana lahan tersebut. Dari hasil identifikasi, dapat didelineasi kelas dan subkelas kemampuan lahan.

d. Penentuan Kelas Lahan

Apabila peta kemampuan lahan atau peta kemampuan tanah sudah ada, akan dapat memudahkan penentuan kelas lahan, karena sudah tidak perlu lagi dilakukan langkah tumpang tindih (*overlay*) peta. Namun demikian identifikasi dan delineasi kelas lahan tetap harus dilakukan.

Analisis kemampuan lahan digunakan untuk menentukan kesesuaian guna lahan untuk jenis tanah yang ada. Kesesuaian ini dengan analisis pembobotan variabel. Pengelompokan

tanah ke satuan kemampuan, sub kelas, kelas didasarkan atas evaluasi dari kombinasi factor berikut:

1. Kemampuan tanah untuk memungkinkan tanaman memberikan tanggapan terhadap suatu penggunaan dan pengelolaan.
2. Tekstur dan struktur tanah
3. Kepekaan terhadap erosi
4. Penjenuhan / kelebihan air pada tanah yang terus-menerus
5. Kedalaman tanah
6. Garam yang merupakan racun bagi tanaman
7. Hambatan fisik seperti bantuan, erosi parit dalam dan lain-lain
8. Iklim

2.9.2 Analisis Kesesuaian Lahan

A. Pengertian Kesesuaian Lahan

Kesesuaian Lahan merupakan suatu penilaian kesesuaian bentang tanah terhadap penggunaan tertentu pada tingkat pengelolaan hasil wajar dengan memperhatikan kelestarian produktifitas dan lingkungannya.

Langkah untuk menentukan kelas kesesuaian lahan :

- a. Pelajari sifat tanah untuk guna lahan perkotaan tertentu
- b. Pilih beberapa sifat tanah erat dengan kebutuhan tani atau bangunan untuk menentukan parameter kesesuaian.
- c. Klasifikasi untuk tiap parameter berjenjang
- d. Membuat kombinasi antar kelas parameter untuk membuat tingkat kesesuaian

Kelas kesesuaian lahan :

S1 : Sesuai , tidak ada pembatas berarti untuk tanah secara berkelanjutan

S2 : Sedang, ada pembatas sedang untuk tanah secara berkelanjutan

S3 : Kecil , ada pembatas berat untuk tanah secara berkelanjutan

S4 : sesuai bersyarat, perlu perlakuan khusus dan ada persyaratan tambahan untuk keberhasilan guna tanah.

T : Tidak sesuai, pembatas kritis dan tanah tidak sesuai untuk digunakan kriteria tertentu

B. Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk revisi alokasi pemanfaatan ruang saat ini. Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan penggunaan lahan yang ada dengan hasil analisa kemampuan lahan.

Cara melakukan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan:

1. Siapkan peta kemampuan lahan.
2. Siapkan peta penggunaan lahan yang berskala sama dengan peta kemampuan lahan.
3. Lakukan tumpang tindih (*overlay*) peta kemampuan lahan dengan peta penggunaan lahan, untuk mendapatkan satuan lahan (unit lahan) . Setiap satuan lahan dapat dideskripsikan sifatnya yang berkaitan dengan faktor penghambat maupun potensinya untuk dikembangkan pemanfaatan ruangnya dan ditentukan kesesuaian penggunaannya.
4. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian, penggunaan lahan yang tidak cocok dengan kemampuannya perlu direkomendasikan perubahan penggunaannya, atau diterapkan teknologi sesuai dengan syarat yang diperlukan oleh lahan tersebut, sehingga lahan tidak rusak dan dapat digunakan secara lestari. Lahan yang penggunaannya cocok dengan kemampuannya tidak perlu diubah penggunaannya.
5. Penggunaan lahan hutan yang kelas kemampuannya cocok untuk pertanian dapat diubah menjadi lahan pertanian tetapi perubahannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, apabila luas kawasan hutan di daerah tersebut tidak mencapai 30%, penggunaan lahan hutan harus dipertahankan.

2.10 Analisis Subsistem agropolitan

2.10.1 Analisis Agrobisnis Hulu (*Agro-input*)

- **Analisis Deskriptif Subsistem Agrobisnis Hulu**

Berdasarkan pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) terdiri atas analisis terhadap industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian hortikultura yang meliputi:

- Industri perbenihan/pembibitan.

Analisis ini menjelaskan mengenai jenis komoditas yang dapat dikembangkan pada wilayah studi dan unit usaha yang berkaitan dengan bahan baku dan pembibitan yang mencakup jenis unit usaha pengembangan pembibitan, sebaran lokasi unit usaha pembibitan,

status kepemilikan serta pengelolaan pengembangan, pengaruh faktor geografis terhadap pengembangan industri pembenihan dan pembibitan serta industri pembenihan di luar wilayah studi yang mensuplay benih, bibit untuk wilayah studi.

- Industri agrokimia (pupuk, pestisida).

Analisis ini menjelaskan mengenai ketersediaan industri agrokimia berupa pupuk dan pestisida yang menunjang pengembangan kawasan agropolitan wilayah studi yang berkaitan dengan unit usaha cakupan jenis unit usaha pengembangan agrokimia pupuk dan pestisida, lokasi agrokimia pupuk dan pestisida, status kepemilikan, pengelolaan pengembangan dan cakupan skala usaha pemasaran hasil industri, industri agrokimia yang mensuplai kebutuhan pupuk serta pestisida di wilayah studi.

- Industri mesin dan peralatan pertanian

Analisis ini mencakup analisis yang terkait dengan teknologi pertanian pada wilayah studi. Cakup analisis untuk industri ini antara lain : jenis teknologi pertanian yang dipakai, pengaruh faktor geografis terhadap penerapan industri mesin dan peralatan yang diperlukan, jenis usaha agro-otomotif yang terdapat di wilayah studi, cakupan agro – otomotif di wilayah studi, agro-otomotif di luar wilayah studi yang mensuplay kebutuhan mesin untuk pengembangan agropolitan di wilayah studi.

2.10.2 Analisis Agrobisnis Usaha Tani (*On Farm*)

- **Analisis Deskriptif Subsistem Usaha Tani**

Subsistem usaha tani merupakan kegiatan produksi pertanian. Tujuan analisis ini terutama digunakan sebagai masukan guna mengadakan estimasi terhadap dampak pengembangan komoditas yang terutama akan menggunakan tolok ukur penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani. Analisis ini secara deskriptif menjelaskan mengenai kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Termasuk dalam hal ini adalah sumber daya manusia, lahan, sarana produksi pertanian, prasarana pertanian dan lembaga pembiayaan.

- Sumber Daya Manusia, menganalisis peranan SDM dalam sektor pertanian (terkait jumlah), peranannya dalam pengembangan sektor pertanian, usaha pengembangan SDM bidang pertanian di wilayah studi.
- Lahan Pertanian, menganalisis jenis dan luasan lahan pertanian di wilayah studi, kondisi fisik, kondisi irigasi, jenis komoditi yang dikembangkan untuk masing-

masing lahan, sebaran lahan pertanian, usaha pengembangan lahan pertanian wilayah studi.

- Sarana Produksi Pertanian, menganalisis ketersediaan dan jenis sarana produksi pertanian di wilayah studi, perolehan sarana produksi pertanian yang menunjang usaha tani di wilayah studi.
- Prasarana Pertanian, menganalisis ketersediaan dan kondisi prasarana pertanian di wilayah studi yang meliputi prasarana irigasi, prasarana jalan, prasarana listrik, prasarana air bersih.
- Lembaga Pembiayaan, menganalisis lembaga pembiayaan yang berperan dalam pengembangan kegiatan produksi pertanian di wilayah studi, serta peranan masing-masing lembaga tersebut.

2.10.3 Analisis Agrobisnis Hilir (*Agro-output*)

- **Analisis Deskriptif Subsistem Agrobisnis Hilir**

Analisis Sub-sistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor. yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*). Analisis deskriptif ini meliputi :

- Sumber Daya Manusia, menganalisis mengenai potensi SDM dalam mengolah hasil pertanian, sistem SDM yang mengelola hasil pertanian dan peranan pemerintah dalam mengembangkan SDM untuk mengelola hasil pertanian di wilayah studi.
- Sarana Industri Pengolahan, menganalisis ketersediaan dan jenis sarana pengelolaan pertanian di wilayah studi, perolehan sarana pengelolaan pertanian yang menunjang usaha tani dan peranan pemerintah dalam menyediakan sarana pengelolaan pertanian di wilayah studi.
- Prasarana Industri Pengolahan, menganalisis ketersediaan dan kondisi prasarana pengelolaan pertanian di wilayah studi yang meliputi prasarana irigasi, prasarana jalan, prasarana listrik, prasarana air bersih.
- Pemasaran, menganalisis pasar untuk menjual hasil dari pertanian primer baik dalam kondisi bahan baku maupun hasil olahan.

2.10.4 Analisis Agrobisnis Penunjang

Analisis ini mendeskripsikan Industri pendukung kegiatan pertanian hortikultura, khususnya yang terkait dengan ketersediaan sumber daya energi, yang meliputi : keterkaitan kondisi fisik geografis terhadap industri pendukung kegiatan pertanian dan sumber daya energi yang diperlukan, jenis usaha industri pendukung kegiatan pertanian hortikultura yang dikembangkan di wilayah studi, cakup layanan usaha industri pendukung kegiatan pertanian hortikultura untuk wilayah studi.

2.11 Analisis Linkage System

Analisis linkage sistem antar sektor ini bertujuan untuk melibatkan hubungan dari berbagai kegiatan dalam perekonomian daerah yang luas. Berbagai rangkaian kegiatan dapat memberikan peluang-peluang produksi dari suatu kegiatan ke kegiatan lain di dalam perekonomian daerah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan atau bahkan kemunduran suatu wilayah.

Linkage sistem ini dapat berupa keterkaitan antara kegiatan hulu dan hilir. Berbagai teori tentang pendorong pertumbuhan daerah menekankan peranan permintaan output-output daerah dan rangkaian kegiatan atau sektor ekonomi yang mengarah ke muka (keterkaitan hilir), yaitu kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*).

- **Analisis Linkage System Antar Sektor**

Analisis linkage sistem antar sektor ini dengan metode pembuatan Diagram *Linkage System* Antar Sektor Kawasan Perencanaan. Digram ini menggambarkan dan digunakan untuk menganalisis sektor-sektor yang mempunyai peran dan pengaruh terhadap pengembangan Kawasan Agopolitan di wilayah studi. Diagram ini juga menggambarkan hubungan antar sektor-sektor tersebut dalam pengembangan Kawasan Agropolitannya. Selain itu juga dianalisis peran masing-masing sektor serta tujuan pengembangan masing sektornya.

- **Analisis Keterpaduan Vertikal dan Horizontal**

- Analisis Keterpaduan Vertikal

Menganalisis kegiatan pembinaan terhadap pengembangan komoditas yang diberi prioritas mulai dari kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam, penanganan pasca panen dan pemasaran. Dalam keterpaduan vertikal dituntut adanya kesepakatan dari instansi terkait untuk memberikan prioritas atas komoditas yang akan dikembangkan pada suatu wilayah serta secara konsekuen membangun sistem pelayanan yang diperlukan untuk pembangunan

komoditas tersebut. Instansi terkait tidak hanya pada satu sektor saja tetapi bersifat lintas sektor.

- Analisis Horizontal

Dalam usaha pertanian keterpaduan horizontal diwujudkan berupa keterpaduan antar sub sektor dalam sektor pertanian, sehingga sub sektor tersebut dapat saling mendukung dalam pemanfaatan lahan pertanian. Keterpaduan horizontal dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan teknologi, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kelembagaan yang ada.

- **Analisis Linkage Sistem Per Komoditi Unggulan**

Menganalisis hubungan antara proses dan pengolahan komoditi menjadi produk sekunder yang memiliki nilai tambah dan dijual pada pasar internal maupun eksternal Kawasan Agropolitan wilayah studi. Analisis ini menggambarkan hubungan sistem agribisnis komoditi mulai dari subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, sub sistem hilir, subsistem penunjang, subsistem pemasaran.

2.12 Analisis Evaluatif Berdasarkan Pustaka dan Standart

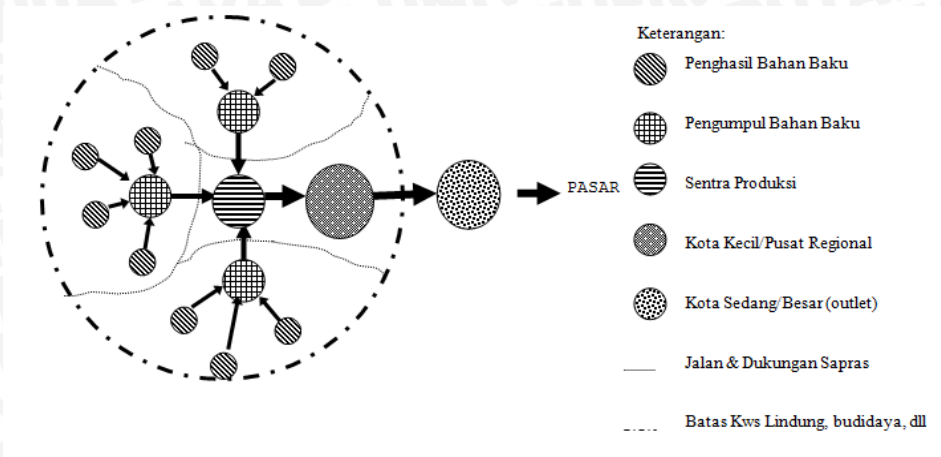
Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi mengenai karakteristik kawasan agropolitan yang ada dengan tinjauan pustaka, standart dan kebijakan yang berlaku. Adapun tinjauan pustaka, standart dan kebijakan yang berlaku yaitu:

- *Location Quotient, Growth Share, Teori Sistem Agropolitan, Teori Regional Network Keterkaitan Spasial-Sektoral (Linkage System), Teori Sentra Produksi Pangan (Agropolitan), Teori Pengembangan Wilayah dan Penataan ruang, Teori Keterkaitan Fungsional*
- Kebijakan sektoral, Kebijakan Tata Ruang, Kebijakan Pengembangan Agropolitan Nasional
- Dasar Hukum Pengembangan Agropolitan

2.13 Analisis Struktur dan Tata Ruang

Menurut Douglas dalam Djakapermana (2003), secara lebih luas, pengembangan kawasan agropolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang

memadai, keterkaitan antar kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud.



Gambar 2. 3 Konsepsi Pengembangan Struktur Tata Ruang

Sumber: Michael Douglass dalam Djakapermana (2003)

1. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986)
 - a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agricultural trade/ transport center*).
 - b. Penyedia jasa pendukung pertanian (*agricultural support services*).
 - c. Pasar konsumen produk non-pertanian (*non agricultural consumers market*).
 - d. Pusat industri pertanian (*agro-based industry*).
 - e. Penyedia pekerjaan non pertanian (*non-agricultural employment*).
 - f. Pusat agropolitan dan *hinterlannya* terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).
2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
 - a. Pusat produksi pertanian (*agricultural production*).
 - b. Intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*).
 - c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non-agricultural goods and services*).

Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*).

2.14 Analisis AHP

Proses Hirarki Analitik atau *Analytic Hierarchy Process* (AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg,

Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan preferensi diantara berbagai alternatif. AHP juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty,1994).

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem. Pada penyelesaian persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain (Saaty,1994):

- a. Dekomposisi, setelah mendefinisikan permasalahan atau persoalan yang akan dipecahkan, maka dilakukan dekomposisi, yaitu : memecah persoalan yang utuh menjadi unsur – unsurnya. Jika menginginkan hasil yang akurat, maka dilakukan pemecahan unsur-unsur tersebut sampai tidak dapat dipecah lagi, sehingga didapatkan beberapa tingkatan persoalan.
- b. *Comparative Judgement*, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relative diantara dua elemen pada suatu tingkatan tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen yang disajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.
- c. *Synthesis of Priority*, yaitu melakukan sintesis prioritas dari setiap matriks *pairwise comparison* “vektor eigen” (ciri) – nya untuk mendapatkan prioritas lokal. Matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, oleh karena itu untuk melakukan prioritas global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala
- d. *Logical Consistency*, yang dapat memiliki dua makna, yaitu 1) obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya; dan 2) tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1994) adalah :

- a. AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur.
- b. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.

- c. AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu system dan tidak memaksakan pemikiran linier.
- d. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemenelemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur serupa dalam setiap tingkat.
- e. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
- f. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
- g. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
- h. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.

AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Pendekatan AHP menggunakan skala banding berpasangan menurut Saaty (1994). Skala banding berpasangan tersebut disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 4 Skala Banding Secara Berpasangan

Skala/tingkat kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen penyumbang sama kuat pada sifatnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas elemen lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominasinya telah terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkannya
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara 2 pertimbangan	Kompromi diperlukan di antara 2 pertimbangan
Kebalikan (1/2,1/3...dst)	Jika untuk aktivitas i mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dengan i.	

Sumber: Saaty (1994)

Tahapan dalam melakukan analisis data AHP menurut Saaty (1994) dikemukakan sebagai berikut :

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah.
3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan *judgement* atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai *key person*. Mereka dapat terdiri atas : 1) pengambil keputusan; 2) para pakar; serta 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.
4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:

$$A = (a_{ij}) = \begin{array}{c|cccc} & C1 & C2 & \dots\dots & Cn \\ \hline C1 & 1 & a_{12} & \dots\dots & a_{1n} \\ C2 & 1/a_{12} & 1 & \dots\dots & a_{2n} \\ \dots\dots & \cdot & \cdot & \dots\dots & \cdot \\ Cn & 1/a_{1n} & 1/a_{2n} & \dots\dots & 1 \end{array}$$

Dalam hal ini $C1, C2, \dots, Cn$ adalah set elemen pada satu tingkat dalam hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks $n \times n$. Nilai a_{ij} merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan C_i terhadap C_j .

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat
6. Nilai pengukuran konsistensi yang diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden
7. Penentuan prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.

8. Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi ($> 0,1$). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

2.15 Analisis SWOT

A. Elemen SWOT

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi obyek yaitu untuk melihat *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threaten* (ancaman) serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah (Rangkuti, 2004: 19-20):

- 1) Kekuatan (*strength*); kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.
- 2) Kelemahan (*weakness*); segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.
- 3) Peluang (*opportunity*); kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan, atau kondisi ekonomi secara global.
- 4) Ancaman (*threaten*); hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.

B. Matriks SWOT

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Adapun cara yang dilakukan adalah:

- 1) SO : Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).
- 2) ST : Staretegi/alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha maksimal menjadikan ancaman sebagai peluang (O).
- 3) WO : Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).

- 4) WT : Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T).

		Internal	
		Strengths	Weaknesses
External Environment	Opportunities	SO	WO
	Threats	ST	WT

Sumber: Rangkuti, 2001

Gambar 2. 4 Matriks SWOT

- **Langkah Pembuatan**

Tahapan – tahapan yang diperlukan untuk pembuatan analisis SWOT adalah :

- Memanfaatkan data dan informasi tentang potensi dan masalah yang ada pada pemetaan potensi dan masalah. Dan tempatkanlah sesuai dengan lokasi dan sektor.
- Menentukan kesempatan dan hambatan dari potensi dan masalah tersebut.
- Memasukkan kedalam matriks
- Melihat keterkaitan unsur –unsur dalam matriks.

2.16 Analisis EFAS-IFAS.

Metode Analisis EFAS merupakan jenis analisis yang digunakan untuk memberikan penilaian dan pembobotan terhadap faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Sembalun, yang meliputi peluang dan ancaman. Sedangkan analisis IFAS merupakan jenis analisis terhadap kekuatan dan kelemahan industri kecil tersebut

A. IFAS (*Internal Strategi Faktors Analisis Summary*)

Cara-cara penentuan faktor strategi Internal / IFAS (Rangkuti. 2001 : 22) :

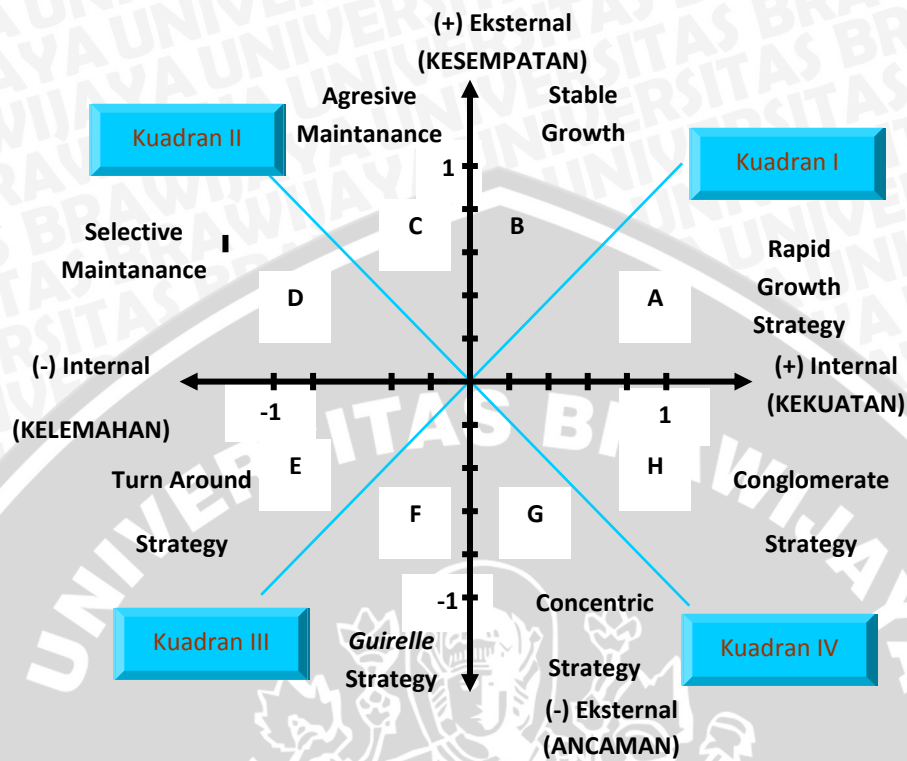
- Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan

2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting).
3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi objek yang bersangkutan.
4. Mengalikan bobot dengan rating. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi.
5. Memberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung

B. EFAS (*Eksternal Strategi Faktor Analisis Summary*)

Cara-cara penentuan faktor strategi eksternal / EFAS (Rangkuti. 2001 : 24):

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman
2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting).
3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi objek yang bersangkutan.
4. Mengalikan bobot dengan rating. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi.
5. Memberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.



Gambar 2. 5 Diagram IFAS-EFAS

Sumber: Rangkuti 2001

- a. Kuadran I (*Growth*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 1. Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu yang singkat
 2. Ruang b dengan *Stable Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.
- b. Kuadran II (*Stability*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 1. Ruang C dengan *Agresif Maintenance Strategy* (melaksanakan pengembangan aktif dan agresif)
 2. Ruang D dengan *Selective Maintenance Strategy* (pemilihan hal-hal yang dianggap penting)

- c. Kuadran III (*Survival*) adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
1. Ruang E dengan *Turn Around Strategy* yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional objek
 2. Ruang F dengan *Guirelle Strategy* yaitu strategi gerilya, sambil operasional dilakukan diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalah dan ancaman
- d. Kuadran IV (*Diversification*) dalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari ruang yaitu:
1. Ruang G dengan *Concentric Strategy* yaitu strategi pengembangna yang dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak.
 2. Ruang H dengan *Conglomerate Strategy* yaitu strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri.



2.17 Studi Terdahulu

Tabel 2. 5
Studi Terdahulu

Judul	Latar Belakang	Identifikasi Masalah	Variabel	Metodologi Penelitian	Output	Perbedaan
<p>Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Wilayah Garut Selatan <i>Oleh Dicky Achmad Muslimansyah (2006)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan di Indonesia yang menekankan pada pertumbuhan (growth priority) yang memfokuskan pada pembangunan industry secara besar-besaran dan padat modal telah menimbulkan berbagai ketimpangan, antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan perdesaan serta antara berbagai daerah • Kabupaten Garut termasuk salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia dimana terdapat ketimpangan internal dalam wilayah Kabupaten Garut, yang meliputi kondisi fisik wilayah dan sosial ekonomi dimana perkembangan fisik lebih condong kea rah utara. • Potensi sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penetapan prioritas komoditas unggulan di Wilayah Garut Selatan sekaligus guna menciptakan efisiensi usaha tani • Perlu adanya penetapan struktur tata ruang bagi pengembangan kawasan agropolitan di Wilayah Garut Selatan yang akan menunjang kegiatan pertanian berdasarkan system dan usaha agribisnis dalam kawasan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas pertanian • Fasilitas penunjang • Pemasaran hasil pertanian 	<p>Pengambilan data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Primer • Data sekunder <p>Analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis penentuan komoditas unggulan berdasarkan aspek penyediaan (<i>supply</i>) dan aspek permintaan (<i>demand</i>). • Metode analisis deskriptif: perwilayahan kegiatan usaha komoditas unggulan. • Metode analisis penentuan pusat-pusat pelayanan pertanian (kota pertanian) • Metode analisis merumuskan struktur tata ruang kawasan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya komoditas pertanian yang memiliki potensi serta prospek untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan di Wilayah Pembangunan II Kabupaten Garut. • Teridentifikasinya perwilayahan komoditas pertanian unggulan terpilih sebagai batasan dari kawasan agropolitan. • Teridentifikasinya pusat-pusat pelayanan pertanian dalam kawasan agropolitan. • Terumuskannya struktur tata ruang kawasan agropolitan di Wilayah Pembangunan II Kabupaten Garut 	<ul style="list-style-type: none"> • Skala wilayah studi dimana pada studi ini skala wilayah kabupaten sedangkan untuk penelitian yang dilakukan skala wilayah kecamatan. • Pada studi ini untuk menentukan komoditas unggulan berdasarkan aspek penyediaan dan aspek permintaan sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis <i>LQ</i>

Judul	Latar Belakang	Identifikasi Masalah	Variabel	Metodologi Penelitian	Output	Perbedaan
	alam di Wilayah Garut Selatan khususnya pertanian cukup melimpah dan beragam namun kegiatan pertanian terbatas pada kegiatan pertanian primer tanpa diikuti dengan pembangunan agribisnis.					
Arahan Pengembangan Wilayah Badung Utara melalui Implementasi konsep Agropolitan Oleh Dewa Nyoman Mahesa Dipayana (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan terjadi karena pembangunan yang lebih terfokus pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan pembangunan wilayah perdesaan. • Perkembangan sektor pariwisata yang lebih banyak berkembang di Wilayah Badung Selatan mengakibatkan munculnya permasalahan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Badung sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Wilayah Badung Utara lebih tertinggal dibandingkan Wilayah Badung Selatan. Wilayah Badung Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi dan mengandalkan sektor pertanian sebagai kegiatan utama. Namun, pengembangan Wilayah Badung Utara yang memanfaatkan potensi pertanian belum secara optimal dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui komoditas unggulan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan di Wilayah Badung Utara, • Penentuan arahan pengembangan Wilayah Badung Utara melalui implementasi konsep agropolitan. 	<p>Pengambilan data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Primer • Data sekunder <p>Analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis penentuan komoditas • Metode analisis deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kriteria pembentuk agropolitan di Wilayah Badung Utara. • Mengidentifikasi komoditas unggulan pertanian di Wilayah Badung Utara. • Menyusun arahan pengembangan Wilayah Badung Utara melalui implementasi konsep agropolitan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skala wilayah studi dimana pada studi ini skala wilayah beberapa kecamatan sedangkan untuk penelitian yang dilakukan skala wilayah satu kecamatan. • Pada studi ini untuk menentukan komoditas unggul selain menggunakan analisis <i>LQ</i> dan <i>shifshare</i> juga menggunakan analisis triangulasi sedangkan pada

Judul	Latar Belakang	Identifikasi Masalah	Variabel	Metodologi Penelitian	Output	Perbedaan
	<p>pembangunan lebih terfokus di wilayah Badung Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk di Wilayah Badung Utara. 					<p>penelitian yang dilakukan tidak menggunakan analisis triangulasi.</p>
<p>Kinerja dan Perspektif Pengembangan Model Agropolitan Berbasis Peternakan Di Kabupaten Barru-Sulawesi Selatan <i>Oleh Hendiarto, Wahyuning K. Sejati, Derry Hidayat, dan I Wayan Rusastra (2004)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan di suatu wilayah kurang terkordinasi dengan baik, dimana antar sektor berjalan dengan sendiri-sendiri, termasuk antar sub-sektor demikian juga antara lokasi maupun regional. • Pembangunan pedesaan sepertinya hanya diarahkan sebagai daerah produsen bahan baku, sedangkan letak aktifitas pasca panennya (proses pengolahan) kadangkala berada jauh dari sentra produksi. • Pembangunan perkotaan dirancang sebagai pusat atau tempat pelayanan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur yang kurang memadai • Keterbatasan modal • Budaya atau kebiasaan pemeliharaan secara tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas peternakan berupa sapi perah • Produksi produk primer dan produk olahan • Struktur tata ruang desa-kota 	<p>Pengambilan data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Primer • Data sekunder <p>Analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis evaluasi konsep dan kinerja program agropolitan. • Metode analisis evaluasi kinerja pelaksanaan program rintisan agropolitan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi siklus dan struktur (tata ruang) keterkaitan desa-kota dan pembangunan wilayah dalam perspektif membangun kelembagaan agropolitan berbasis agribisnis. • Mengevaluasi kinerja produksi primer dan produk olahan komoditas pertanian unggulan dan strategi kebijakan pengembangan usahatani dan agroindustri. • Mengevaluasi kinerja pasar input dan strategi kebijakan yang terkait dengan pasar sarana produksi utama • Mengevaluasi kinerja pasar output dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada studi ini telah ditentukan pengembangan model agropolitan berbasis peternakan sedangkan pada penelitian yang dilakukan komoditas basisnya belum ditentukan (sesuai dengan hasil analisis yang akan dilakukan). • Metode analisis yang digunakan. • Output yang dihasilkan pada studi ini digunakan untuk mengevaluasi

Judul	Latar Belakang	Identifikasi Masalah	Variabel	Metodologi Penelitian	Output	Perbedaan
	dan penyedia barang konsumsi, belum menyentuh usaha penyerapan produk/bahan baku yang dihasilkan daerah pedesaan.				<p>strategi kebijakan yang terkait dengan pasar produk primer dan olahan komoditas pertanian unggulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi organisasi dan tata kerja yang mencakup kelompok kerja secara hirarkis. • Mengevaluasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. • Mengevaluasi metode pelaksanaan program agropolitan. • Melakukan evaluasi kinerja pengembangan program rintisan agropolitan dengan mengacu kepada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 	sedangkan pada penelitian digunakan sebagai acuan arahan pengembangan kawasan agropolitan.

